

**SIKAP POLITIK UMAT KRISTEN  
(STUDI EKSEGESIS TERHADAP ROMA 13 : 1-7 DAN RELEVANSINYA  
TERHADAP SIKAP POLITIK UMAT KRISTEN DI INDONESIA  
PADA ERA REFORMASI)**

**SKRIPSI INI DISERAHKAN  
KEPADA DEWAN PENGAJAR**

**SEMINARI ALKITAB ASIA TENGGARA**

**UNTUK MEMPEROLEH GELAR  
MAGISTER DIVINITAS**

**OLEH  
MAGDALENA HANANING TRIYANTI**



**MALANG, JAWA TIMUR  
MARET 2005**

## ABSTRAK

Triyanti, Magdalena Hananing, 2005. *Sikap Politik Umat Kristen (Studi Eksegesis Terhadap Roma 13:1-7 dan Relevansinya Terhadap Sikap Politi Umat Kristen di Indonesia Pada Era Reformasi)*. Skripsi, Program Magister Divinitas, Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Pembimbing: Andreas Hauw, M. Th.

Kata kunci: *dualcitizenship*, konsep identitas, model sikap politik, relevan.

Umat Kristen memiliki dua kewarganegaraan yaitu, warga negara surga dan warga negara dunia. *Dualcitizenship* ini menempatkan umat Kristen pada posisi yang dilematis, sekaligus mengakibatkan munculnya krisis identitas. Situasi dan kondisi yang dilematis ini disebabkan umat Kristen harus berhadapan dengan dua otoritas yang sama-sama menuntut adanya sikap takluk dari umat Kristen. Tuntutan yang demikian ini menyebabkan umat Kristen sering kali mengalami hubungan yang *disharmony* dengan pihak pemerintah.

Melalui Roma 13:1-7, Paulus mengemukakan sebuah model sikap politik untuk mengatasi hubungan yang *disharmony* tersebut. Model sikap politik tersebut merupakan suatu model yang didalamnya terdapat konsep identitas, dan tiga aspek penting yang harus ada dalam diri umat Kristen. *Pertama*, mengenai konsep identitas. Pada bagian ini Paulus menjelaskan betapa pentingnya umat Kristen memiliki konsep identitas yang berdasarkan pada karya pembenaran Allah; konsep identitas sebagai anak Allah. *Kedua*, mengenai tiga aspek penting dalam sikap politik umat Kristen. Aspek-aspek tersebut adalah: (1) Aspek afektif berupa rasa simpati terhadap pemerintah yang berlandaskan kasih; (2) Aspek kognitif berupa pengakuan terhadap otoritas pemerintah, yang didasarkan pada kedaulatan dan legitimasi Allah atas pemerintah, (3) Aspek konatif berupa tindakan melakukan kewajiban-kewajiban yang tidak bertentangan dengan iman Kristen.

Model sikap politik yang dikemukakan oleh Paulus ini merupakan suatu model yang relevan bagi umat Kristen di Indonesia, sebab model tersebut dapat menjawab pergumulan-pergumulan yang harus dihadapi ketika mereka berhubungan dengan pemerintah. Model sikap politik Paulus tersebut bermanfaat dalam mengevaluasi sikap politik umat Kristen di Indonesia, dan membawa implikasi yang positif bagi hubungan umat Kristen dengan pihak pemerintah pada era reformasi ini.

## UCAPAN TERIMA KASIH

*“Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran-Nya, maka segalanya akan ditambahkan kepadamu” (Mat. 6:33)*

Melalui hamba-hamba-Nya yang mengasihi penulis, firman Tuhan ini boleh menjadi suatu kenyataan dalam kehidupan penulis selama studi di Seminari Alkitab Asia Tenggara. Kepada para hamba-Nya tersebut, penulis ingin mengucapkan terima kasih dari hati yang paling dalam.

*Pertama*, kepada Bapak Andreas Hauw, M.Th. Penulis sangat bersyukur diberikan seorang dosen pembimbing yang memiliki wawasan luas, tekun, teliti, kooperatif, sabar, ramah, dan rendah hati. Perpaduan antara kemampuan intelektual dan spiritual yang sungguh menjadi berkat bagi penulis.

*Kedua*, kepada para dosen yang telah mengajar penulis. Satu hal yang penulis ingin katakan kepada mereka, “Bapak dan Ibu telah membuat saya memahami, mencintai, dan mau melakukan firman Tuhan.” Sebelum meninggal dunia papa pernah berkata, “Magda, kalau mau belajar firman Tuhan masuklah ke SAAT.” Kalimat tersebut baru penulis mengerti ketika menempuh studi di tempat ini, sebab Bapak dan Ibu dosen dengan sangat serius mengajarkan kebenaran firman Tuhan.

*Ketiga*, kepada Bapak dan Ibu Lukas Tanudjaja yang Tuhan telah utus untuk membiayai studi penulis di tempat ini. Mereka bukan hanya mujizat yang Tuhan berikan bagi penulis, tetapi mereka juga telah menjadi teladan kasih yang indah bagi penulis.

*Keempat*, secara khusus untuk Oom Paul Gunadi, “terima kasih atas pelayanan konselingnya, Magda merasa sangat beruntung karena dapat banyak berkat melalui pelayanan Oom Paul. Seandainya Papa masih hidup, papa pasti akan memeluk Oom Paul dan mengucapkan sejuta terima kasih. Tuhan memberkati Oom Paul dan keluarga.

*Kelima*, untuk Mama, Yusak, Hemy, Paul, yang penulis sangat cintai. Kasih yang kalian berikan untuk penulis begitu berlimpah. Penulis merasa sangat bangga dan beruntung memiliki kalian. Kalian (dan almarhum papa) sangat berarti dalam hidup penulis.

*Keenam*, kepada sahabatku Sonny, “*The closer we to God, the closer we to each other.*” Terima kasih atas kasih Kristus yang Sonny berikan, kasih ini telah mengubah hidupku menjadi semakin serupa Kristus. Sonny adalah hadiah istimewa yang Tuhan Yesus berikan untuk penulis. Terlalu banyak hal indah yang Sonny berikan, dan penulis tidak akan pernah melupakannya. Sahabatku, Tuhan Yesus memberkatimu.

*Ketujuh*, kepada sahabatku Krisni. Persahabatan ini sungguh indah, sebab dibangun bersama Kristus. Krisni adalah bau harum Kristus dalam hidupku. Terima kasih karena telah membawa penulis lebih dekat kepada Kristus. Jam-jam doa kita akan selalu menjadi *moment* “pertemuan” kita berdua, dimanapun dan kapanpun. Tetap setia berdoa ya.

*Kedelapan*, kepada teman-teman baik penulis. Terima kasih Ko Andi dan Kak Hermin yang telah membantu mengedit skripsi ini. Terima kasih banyak juga untuk

Hana, Nonik, Fen-fen. Kalian bertiga teman-teman kamar yang sangat menyenangkan. Terima kasih juga untuk Fini Chen yang kesaksian imannya telah menjadi berkat bagi penulis. Terima kasih untuk Hendra yang begitu sabar dalam menghadapi penulis pada awal-awal semester. Kesabaran tersebut telah banyak mengubah karakter penulis dalam berelasi dengan orang lain. Terima kasih untuk Tono yang telah menjadi teman pelayanan yang begitu baik. Penulis selalu merindukan saat-saat pelayanan tersebut. Terima kasih untuk Nining yang telah menjadi teman rohani bagi penulis selama pembentukan di SAAT.

*Kesembilan*, terima kasih untuk Masta 2001. Begitu banyak kenangan indah yang telah kita lewati bersama. Kalian telah menjadi saluran berkat sekaligus sarana yang Tuhan Yesus gunakan dalam membentuk penulis. Nama-nama kalian akan selalu penulis ingat dalam doa-doa yang penulis sampaikan di hadapan Tuhan Yesus. Tetap setia dalam mengikut Tuhan Yesus ya.

*Kesepuluh*, secara khusus penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pdt. Ferry Mamahit, M.Th yang telah memeriksa skripsi ini. Penulis berdo'a kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan dan keluarga Bapak.

Penulis

## DAFTAR SINGKATAN

### ALKITAB:

LAI Lembaga Alkitab Indonesia  
NRSV New Revised Standard Version

### AYAT-AYAT ALKITAB

|       |              |      |                  |
|-------|--------------|------|------------------|
| 1Kor. | 1 Korintus   | Ibr. | Ibrani           |
| 1Ptr. | 1 Petrus     | Im.  | Imamat           |
| 1Tes. | 1 Tesalonika | Kis. | Kisah Para Rasul |
| 1Tim. | 1 Timotius   | Kol. | Kolose           |
| 2Kor. | 2 Korintus   | Luk. | Lukas            |
| 2Sam. | 2 Samuel     | Mat. | Matius           |
| 2Taw. | 2 Tawarikh   | Mrk. | Markus           |
| Ams.  | Amsal        | Mzm. | Mazmur           |
| Ayb.  | Ayub         | Rm.  | Roma             |
| Dan.  | Daniel       | Tit. | Titus            |
| Efs.  | Efesus       | Yer. | Yeremia          |
| Est.  | Ester        | Yes. | Yesaya           |
| Gal.  | Galatia      | Yud. | Yudas            |
| Hak.  | Hakim-hakim  |      |                  |

### BUKU:

NIVAC New International Version Application Commentary  
TICC The International Critical Commentary  
WBC Word Biblical Commentary

### LAIN-LAIN:

5<sup>th</sup>ed. Fifth edition  
APBD Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah  
bdk. Bandingkan  
BLBI Badan Likuidasi Bank Indonesia

|          |                                        |
|----------|----------------------------------------|
| DPRD     | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah         |
| ed.      | editor                                 |
| eds.     | banyak editor                          |
| Ibid.    | sama dengan Sebelumnya                 |
| KKN      | Korupsi Kolusi Nepotisme               |
| lih.     | lihat                                  |
| LXX      | Septuaginta                            |
| PB       | Perjanjian Baru                        |
| PGI      | Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia |
| PL       | Perjanjian Lama                        |
| rev. ed. | revision editor                        |
| t. l.    | translator                             |
| t.k.     | tanpa kota                             |
| t.p.     | tanpa penerbit                         |
| t.t.     | tanpa tahun                            |
| tr.      | terjemahan                             |
| UUD      | Und                                    |



## DAFTAR BAGAN

|          |                                                                                                                                                    |     |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Bagan 1  | Struktur Sintaksis Roma 13:1-7 .....                                                                                                               | 28  |
| Bagan 2  | : Outline Roma 13:1-7 .....                                                                                                                        | 29  |
| Bagan 3  | : Rangkuman Studi Eksegesis dan Pandangan Teoritis<br>Terhadap Roma 3:1-7 .....                                                                    | 48  |
| Bagan 4  | : Model Hirarkis-Bersyarat .....                                                                                                                   | 56  |
| Bagan 5  | : Dasar Untuk Tidak Melakukan Kewajiban Terhadap<br>Pemerintah Roma .....                                                                          | 58  |
| Bagan 6  | : Struktur Ketatanegaraan Sebelum Perubahan UUD 1945 .....                                                                                         | 75  |
| Bagan 7  | : Struktur Ketatanegaraan Setelah Perubahan UUD 1945 .....                                                                                         | 75  |
| Bagan 8  | : Situasi dan Kondisi Indonesia Pada Era Reformasi Serta Pola-pola<br>Hubungan Pemerintah dan Masyarakat yang Menyertainya .....                   | 81  |
| Bagan 9: | Konsep Identitas-Sikap-sikap Politik Rakyat Indonesia dan<br>Umat Kristen di Indonesia di Tengah-tengah Situasi dan Kondisi<br>Era Reformasi ..... | 95  |
| Bagan 10 | : Persamaan-Perbedaan Umat Kristen di Roma dan di Indonesia .....                                                                                  | 97  |
| Bagan 11 | : Relevansi Model Sikap Politik Dalam Roma 13:1-7 Terhadap<br>Sikap Politik Umat Kristen di Indonesia .....                                        | 99  |
| Bagan 12 | : Model Sikap Politik Paulus .....                                                                                                                 | 103 |

## DAFTAR ISI

|                                                                          |      |
|--------------------------------------------------------------------------|------|
| LEMBAR SERTIFIKASI .....                                                 | i    |
| ABSTRAK .....                                                            | ii   |
| UCAPAN TERIMA KASIH .....                                                | iii  |
| DAFTAR SINGKATAN .....                                                   | vi   |
| DAFTAR BAGAN .....                                                       | viii |
| DAFTAR ISI .....                                                         | ix   |
| <br>                                                                     |      |
| BAB I PENDAHULUAN .....                                                  | 1    |
| LATAR BELAKANG DAN TUJUAN .....                                          | 1    |
| PERUMUSAN MASALAH .....                                                  | 9    |
| TUJUAN PENELITIAN .....                                                  | 9    |
| BATASAN MASALAH .....                                                    | 9    |
| METODE DAN SISTEMATIKA .....                                             | 10   |
| <br>                                                                     |      |
| BAB II SIKAP POLITIK PAULUS (Studi Eksegesis Terhadap Roma 13:1-7) ..... | 11   |
| TEKS ROMA 13:1-7 .....                                                   | 11   |
| INTRODUKSI SURAT ROMA .....                                              | 12   |
| <i>Penulis dan Kewarganegaraannya</i> .....                              | 12   |
| <i>Tanggal Penulisan</i> .....                                           | 14   |

|                                                                     |    |
|---------------------------------------------------------------------|----|
| <i>Penerima</i> .....                                               | 15 |
| <i>Tema dan Tujuan Penulisan</i> .....                              | 16 |
| <b>ANALISA KONTEKS</b> .....                                        | 17 |
| <i>Konteks Dekat</i> .....                                          | 17 |
| <i>Konteks Jauh</i> .....                                           | 21 |
| <b>ANALISA STRUKTUR SINTAKSIS</b> .....                             | 22 |
| <b>ANALISA KATA</b> .....                                           | 30 |
| <i>Sikap Takluk terhadap Pemerintah</i> .....                       | 30 |
| <i>Dasar bagi Sikap Takluk terhadap Pemerintah</i> .....            | 33 |
| <i>Aplikasi Praktis bagi Sikap Takluk terhadap Pemerintah</i> ..... | 37 |
| <b>ANALISA LATAR BELAKANG SEJARAH</b> .....                         | 38 |
| <b>ANALISA TEOLOGIS</b> .....                                       | 45 |
| <b>INTERPRETASI</b> .....                                           | 47 |
| <br>                                                                |    |
| <b>BAB III RELEVANSI ROMA 13-1-7 TERHADAP SIKAP POLITIK UMAT</b>    |    |
| <b>KRISTEN DI INDONESIA PADA ERA REFORMASI</b> .....                | 60 |
| <b>SITUASI DAN KONDISI INDONESIA PADA ERA REFORMASI</b> .....       | 60 |
| <i>Situasi dan Kondisi Sosial</i> .....                             | 61 |
| <i>Situasi dan Kondisi Ekonomi</i> .....                            | 65 |
| <i>Situasi dan Kondisi Agama</i> .....                              | 68 |
| <i>Situasi dan Kondisi Budaya</i> .....                             | 72 |
| <i>Situasi dan Kondisi Politik</i> .....                            | 75 |
| <br>                                                                |    |
| <b>KONSEP IDENTITAS UMAT DI TENGAH-TENGAH SITUASI</b>               |    |

|                                                                                 |            |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------|
| DAN KONDISI INDONESIA PADA ERA REFORMASI .....                                  | 82         |
| RELEVANSI ROMA 13:1-7 TERHADAP SIKAP POLITIK UMAT<br>KRISTEN DI INDONESIA ..... | 96         |
| <b>BAB IV PENUTUP .....</b>                                                     | <b>102</b> |
| <b>KESIMPULAN .....</b>                                                         | <b>102</b> |
| <b>SARAN .....</b>                                                              | <b>107</b> |
| <b>DAFTAR KEPUSTAKAAN .....</b>                                                 | <b>109</b> |



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### LATAR BELAKANG MASALAH

Umat Kristen memiliki dua kewarganegaraan, yaitu warga negara surga dan warga negara dunia, sebagaimana diungkapkan oleh Richard D. Land, "*The New Testament teaches us that Christians are citizens of two realms, the earthly and the spiritual.*"<sup>1</sup> Kedua hal ini tidak dapat dipisahkan<sup>2</sup> satu dengan yang lain sebab, setiap umat Kristen memiliki hak dan tanggung jawab baik sebagai warga negara surga maupun sebagai warga negara dunia.<sup>3</sup> Umat Kristen dapat melihat hal ini pada pribadi Kristus yang berfokus pada Bapa tetapi juga hadir secara utuh di tengah-tengah dunia ini.<sup>4</sup> Dengan cara pandang yang demikian, umat Kristen seharusnya dapat menempatkan diri secara tepat dalam posisi sebagai warga negara surga maupun warga negara dunia.<sup>5</sup>

---

<sup>1</sup>"Citizen Christians Have Rights Too" dalam *Citizen Christians: The Right and Responsibilities of Dual Citizenship* (eds. Richard D. Land dan Louise A. Moore; Nashville: Broadman & Holman, 1994) 6.

<sup>2</sup>Pemisahan hanya relevan pada saat kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali sebab pada saat itu umat Kristen menanggalkan kewarganegaraan duniawinya dan hanya mengenakan kewarganegaraan surgawinya (J. Marcellus Kik, *Church and State in the New Testament* [Philadelphia: Presbyterian and Reformed, 1962] 23-24). Dalam tulisannya yang lain, Kik menegaskan bahwa orang yang mencoba untuk memisahkan kedua hal ini, sama dengan mencoba memisahkan Allah dari hukum-hukum-Nya (J. Marcellus Kik, *Church and State: The Story of Two Kingdoms* [New York: Thomas Nelson & Sons, 1963] 121).

<sup>3</sup>Land, "Citizen" 6.

<sup>4</sup>Emanuel Gerrit Singgih, *Iman dan Politik dalam Era Reformasi di Indonesia* (Jakarta: Gunung Mulia, 2000) 5-6.

<sup>5</sup>Richard D. Land dan Louise A. Moore, "Pengantar" dalam *Citizen Christians: The Right and Responsibilities of Dual Citizenship* (eds. Richard D. Land dan Louise A. Moore; Nashville: Broadman & Holman, 1994).

Upaya untuk menempatkan diri secara tepat bukan hal yang mudah dalam praktiknya, sebab umat Kristen harus berhadapan dengan tuntutan untuk bersikap takluk kepada dua otoritas. Sebagai warga negara surga, umat Kristen dituntut memiliki sikap takluk terhadap hukum yang ditetapkan oleh Allah, seperti yang diungkapkan oleh A. N. Triton:

*The law of God is not a relic of a pre-Christian era. It is the expression of the Creator's instruction to man in his ignorance and sinfulness. Therefore we delight in the law of God. It is good and acceptable and perfect. It describes how we are meant to function and delivers us from a thousand and one errors. Our Lord in the Sermon on the Mount and Paul in Roman 13:8-10 stress that the law is still our rule though Christians must do more and not less than the law demands.*<sup>6</sup>

Di sisi yang lain, sebagai warga negara dunia, umat Kristen harus memiliki sikap takluk terhadap hukum yang ditetapkan oleh para penguasa. J. Philip Wogaman mengatakan, *"In every civil society people are conditioned to obey political authority whether or not they agree with its policies."*<sup>7</sup> Pernyataan Wogaman ini tidak mudah untuk dilakukan oleh umat Kristen sebab mereka dituntut untuk takluk kepada Allah terlebih dahulu, seperti yang dikatakan oleh Richard D. Land dan Louise A. Moore, *"We are Christians first; at the core of our being should be our dedication to God through our Lord and Savior Jesus Christ."*<sup>8</sup> Artinya, peran sebagai warga negara surga harus menjadi prioritas utama. Di sini letak masalahnya sebab pemerintah di dunia ini juga menuntut untuk diprioritaskan oleh warga negaranya.

Sejarah kekristenan menunjukkan bahwa situasi dilematis di atas telah mengakibatkan terbentuknya beberapa sikap politik umat Kristen. Pada periode gereja

---

<sup>6</sup>*Whose World* (London: Inter-Varsity, 1970) 26-27.

<sup>7</sup>*Christian Perspectives on Politics* (Louisville: Westminster/John Knox, 2000) 27.

<sup>8</sup>Land, "Pengantar."

mula-mula (abad I-IV), umat Kristen memiliki dualisme sikap<sup>9</sup> dalam memandang kehidupan religius dan bidang politik. Dualisme sikap ini dapat dimengerti seperti yang diungkapkan oleh Wogaman:

*The ambivalence of early Christian views of the state is understandable because the persecute during the first centuries and the rise to power of Constantine in A.D. 313 (the first Christians emperor absolutely reversed the political status of Christian).*<sup>10</sup>

Sepanjang tiga abad pertama, sikap politik umat Kristen yaitu memisahkan secara ketat kehidupan religius dengan bidang politik. Faktor penyebabnya ialah pada abad-abad permulaan pemerintah Romawi meresmikan suatu agama negara, yaitu penyembahan kepada kaisar, dan umat Kristen menolak untuk mengikuti agama negara tersebut sebab bertentangan dengan kekristenan. Penolakan ini mengakibatkan pemerintah Romawi mencurigai kesetiaan dan kejujuran kaum Kristen sebagai warga negara Romawi.<sup>11</sup> Konfrontasi antara umat Kristen dengan pemerintah tidak dapat dihindari<sup>12</sup> dan umat Kristen memandang pemerintah sebagai sesuatu yang jahat.<sup>13</sup>

Kemudian pada abad keempat, semasa pemerintahan Kaisar Konstantianus yang beragama Kristen, umat Kristen mendapat perlakuan yang baik dari pemerintah dan diberi hak-hak istimewa.<sup>14</sup> Situasi dan kondisi yang demikian membuat umat Kristen

---

<sup>9</sup>Agnes Cunningham, *The Early Church and the State* (tr. Michael Di Maio dan Agnes Cunningham; Philadelphia: Fortress, 1982) 2.

<sup>10</sup>*Christian* 36,38.

<sup>11</sup>H. Berkhof, *Sejarah Gereja* (tr. I. H. Enklaar; Jakarta: Gunung Mulia, 1997) 16.

<sup>12</sup>Kik, *Church and State* in 7.

<sup>13</sup>Wogaman, *Christian* 36-39; bdk. Donald Jay Losher, "Gereja dan Negara: Tipe-tipe Sikap dalam Sejarah Gereja," *Peninjau* XV/2 (1990) 66-67.

<sup>14</sup>Berkhof, *Sejarah* 48-49.

bersikap positif terhadap pemerintah dan menyatukan kesetiaan kepada Allah dengan kesetiaan kepada kaisar.<sup>15</sup>

Periode berikutnya yang perlu dicermati adalah abad-abad pertengahan (abad V-XVIII). Sikap-sikap politik umat Kristen sangat dipengaruhi oleh pandangan dua tokoh besar, yaitu Agustinus dan Thomas Aquinas. *Pertama*, Agustinus (354-430). Melalui karya tulisnya, *De Civitate Dei* (Kota Allah),<sup>16</sup> Agustinus menekankan bahwa baik umat Kristen maupun negara terjebak di dalam keadaan ambigu dan tidak sempurna yang terletak di tengah-tengah kota surgawi dan kota duniawi. Dalam relasi di antara keduanya, umat Kristen tidak dapat melepaskan diri dari tanggung-jawab di dalam *civitas terenna* (kota duniawi). Artinya, umat Kristen tetap harus menjalankan kewajibannya sebagai warga negara duniawi.<sup>17</sup>

Secara teoritis, Agustinus tetap memandang negara sebagai sesuatu yang sekuler sehingga ia menolak berdirinya negara Kristen. Dalam realisasinya, pandangan Agustinus ini ternyata sulit untuk diterapkan, sebab konteks zaman pada masa tersebut menyebabkan munculnya absolutisme dalam komunitas Kristen dan absolutisme kekaisaran secara silih berganti. Absolutisme yang dimaksud di sini adalah suatu kondisi dimana kekuasaan gereja terhadap negara sangat dominan, atau sebaliknya keterlibatan negara terhadap gereja sangat dominan.<sup>18</sup>

---

<sup>15</sup>Wogaman, *Christian* 36-39; bdk. Losher, "Gereja" 66-67.

<sup>16</sup>Merupakan karya tulis pertama dari seorang Kristen yang di dalamnya membahas masalah politik secara mendalam. Karya tulis ini memiliki nilai yang sangat penting dalam sejarah kekristenan sebab *De Civitate Dei* ditulis sebagai respon atas tuduhan-tuduhan pemerintah Romawi terhadap kekristenan (Wogaman, *Christian* 38; bdk. J. H. Rapar, *Filsafat Politik Agustinus* [Jakarta: Rajawali, 1989] 52).

<sup>17</sup>Frederick Copleston, *A History of Philosophy* (New York: Image, 1950) 2.87-90.

<sup>18</sup>Copleston, *A History* 2.89; bdk. Losher, "Gereja" 70.

*Kedua*, Thomas Aquinas (1225-1274). Aquinas mencoba mengatasi ketegangan di atas dengan menawarkan model sikap yang dikenal dengan istilah *Christendom*. Model ini menempatkan gereja dan negara dalam suatu pemisahan tidak ketat sekaligus relasi kerjasama atau interaksi yang berdasarkan “hukum kodrati”<sup>19</sup>. Di dalam teori ini akhirnya semua orang dituntut untuk taat dan takluk pada satu kuasa ilahi tunggal, yaitu Allah, lewat dua jalur yaitu gereja dan negara, yang sama-sama terikat untuk melayani dan mengantar kuasa illahi tersebut.<sup>20</sup>

Masih pada abad pertengahan, pada zaman reformasi tampil dua tokoh besar dengan pandangan-pandangan pokok yang sangat mempengaruhi sikap politik umat Kristen. Kedua tokoh tersebut adalah Luther dan Calvin. Luther (1483-1546) dengan teori pemerintahannya yang sangat praktis mengemukakan bahwa komunitas Kristen membutuhkan perlindungan negara agar dapat hidup. Luther berpendapat bahwa umat Kristen wajib menjalankan fungsinya sebagai warga negara dunia melalui sikap taat terhadap pemerintah. Sebaliknya, negara juga memiliki kewajiban untuk memperhatikan kepentingan umat Kristen. Pendekatan Luther ini sebetulnya menggunakan model *Christendom* yang telah dimodifikasi, sehingga melahirkan pandangan politik yang bersifat asimilatif dan teosentris. Asimilatif yang dimaksud pada bagian ini yaitu persatuan kuasa antara negara dan gereja, dimana negara berperan lebih dominan. Kemudian teosentris yang dimaksud oleh Luther yaitu, dalam menjalani kehidupan di dunia ini umat Kristen harus memiliki pandangan dasar yang berpusat kepada Allah

---

<sup>19</sup>Hukum kodrati berada di bawah hukum abadi dan merupakan bentuk partisipasi makhluk rasional di dalam hukum abadi. Sebagai hukum, ia memiliki sifat universal dan tidak dapat berubah sebab hukum ini memiliki karakteristik *non-conventional* atau dibentuk tidak didasarkan atas kesepakatan (E. Sumaryono, *Etika dan Hukum* [Yogyakarta: Kanisius, 2002] 106,121).

<sup>20</sup>Copleston, *A History* 2.412-422. Model ini mendapat dukungan dari Duns Scotus (Lusher, “Gereja” 69,71).

tetapi juga tetap taat dan bergantung kepada negara.<sup>21</sup> Dengan posisi yang demikian, Luther sebetulnya memberi kesempatan luas bagi negara untuk menjalankan fungsi pemerintahannya sehingga umat Kristen tidak terlalu dapat mencampuri kebijakan pemerintah.

Berbeda dengan pandangan Yohanes Calvin yang bersifat asimilatif dan teokratis. Perbedaannya terletak pada model asimilatif yang ia kemukakan. Dalam model asimilatifnya, keunggulan gereja lebih ditekankan. Menurut Calvin, prioritas tetap ada pada gereja. Kemudian mengenai pandangan teokratis, Calvin berpendapat bahwa orang-orang Kristen harus secara aktif menciptakan peraturan Allah di dunia ini. Sekalipun menekankan keunggulan gereja, Calvin juga berpandangan bahwa umat Kristen tetap harus taat terhadap pemerintah bahkan yang jahat sekalipun, tetapi ketaatan tersebut merupakan ketaatan yang bersyarat, sebab orang Kristen tetap harus menolak perintah-perintah yang bertentangan dengan kitab suci.<sup>22</sup>

Berikutnya, pada zaman modern (abad XIX-XXI). Sikap-sikap politik yang dianggap relevan adalah beberapa variasi dari model pemisahan dan interaksi. Beberapa variasi tersebut adalah model pemisahan ketat, agama sipil, transformasi dan pembebasan. *Pertama*, model pemisahan ketat. Model ini menempatkan orang Kristen pada posisi tidak memiliki peranan politik. Mereka tidak dapat melakukan apa-apa yang memberi akibat kepada *status quo* secara politis maupun sosial. Singkatnya, mereka jadi bersikap pasif terhadap pemerintah. *Kedua*, model agama sipil. Model ini menempatkan agama pada posisi dikuasai oleh pemerintah dan ideologi tertentu, sehingga umat Kristen

---

<sup>21</sup>Wogaman, *Christian* 43

<sup>22</sup>Yohanes Calvin, *Institutio* (tr.; Jakarta: Gunung Mulia, 1983) 256-260; bdk. Wogaman, *Christian* 43-44.

hanya mampu menerima segala kebijakan secara pasif. *Ketiga*, model transformasi. Model ini menempatkan orang Kristen untuk berperan aktif terhadap perubahan politis dan pembaharuan sosial, sambil mewaspadaai bahaya pluralisme dan sekularisme. *Keempat*, model pembebasan. Model ini menekankan pembebasan secara sosial dan politik yang bersifat revolusioner.<sup>23</sup>

Pada kurun waktu yang sama, sejarah kekristenan di Indonesia juga mencatat bahwa terdapat beberapa model sikap politik umat Kristen, seiring dengan berbagai perubahan politik di tanah air. Pada masa awal orde lama (1945-1965), umat Kristen terlibat aktif dalam bidang politik dan memiliki hubungan yang baik dengan pemerintah, khususnya dengan Presiden Soekarno. Hubungan baik ini tak lepas dari pandangan dan penilaian Soekarno atas umat Kristen di negeri ini, sehingga pemerintah bersikap kooperatif terhadap umat Kristen. Kemudian semasa orde baru (1965-1998), umat Kristen seakan-akan berada di atas angin dan banyak menduduki jabatan dalam struktur pemerintahan. Keadaan ini tidak berlangsung lama sebab selebihnya pemerintah orde baru lebih banyak merangkul kalangan Islam. Akibatnya umat Kristen mulai tidak terlalu terlibat dalam bidang politik dan cenderung mencurigai pemerintah, oleh karena tekanan yang mulai dirasakan terhadap kekristenan.<sup>24</sup>

Munculnya sikap politik dalam berbagai variasi pada setiap konteks zaman sebagaimana diungkapkan di atas, merupakan implikasi logis dari *dualcitizenship*. Berbagai fenomena di atas memunculkan suatu pertanyaan yang serius yaitu, “sikap politik seperti apakah yang paling tepat bagi umat Kristen?” Alkitab menunjukkan

---

<sup>23</sup>Wogaman, *Christian* 45-46; bdk. Losher, “Gereja” 76-77.

<sup>24</sup>Singgih, *Iman* 28-40; bdk. Jan S. Aritonang, “Kiprah Kristen Dalam Sejarah Perpolitikan di Indonesia,” *Proklamasi* V/3 (Februari 2004) 35, 40-41.

bahwa Roma 13:1-7 merupakan perikop yang paling eksplisit<sup>25</sup> dalam menyatakan pandangan Paulus mengenai sikap politik yang seharusnya dimiliki oleh umat Kristen yang menyanggah *dualcitizenship*. Dalam perikop ini Paulus menyatakan bahwa sikap takluk terhadap pemerintah merupakan sikap politik yang seharusnya dimiliki oleh umat Kristen.

Pernyataan Paulus ini mengakibatkan munculnya perdebatan serius dalam bidang eksegesis dan teologis pada masa kini. Mengenai hal ini Neil Elliot mengatakan, "*The exhortation to 'be subject to the governing authorities' in Romans 13 (NRSV) is at once a notorious exegetical problem and a theological scandal for us today.*"<sup>26</sup> Pernyataan Paulus ini bahkan telah mengakibatkan banyak ketidakbahagiaan dan kesengsaraan bagi orang-orang Kristen di wilayah Timur dan Barat; sebab ayat-ayat ini seringkali dijadikan *excuse* terhadap para penguasa yang lalim dalam melakukan tindakan-tindakan yang melanggar hak asasi umat Kristen.<sup>27</sup>

Realitas ini terbentuk karena adanya interpretasi yang tidak tepat terhadap Roma 13:1-7; oleh sebab itu maka suatu studi eksegesis akan dilakukan terhadap perikop ini. Studi eksegesis ini diperlukan untuk menjelaskan maksud Paulus mengenai sikap takluk terhadap pemerintah. Penjelasan ini akan sangat bermanfaat juga bagi umat Kristen di Indonesia, sebab mereka saat ini sedang berada dalam era reformasi. Era baru dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia ini menghadapkan mereka pada berbagai kemungkinan sikap politik, sehingga penjelasan terhadap Roma 13:1-7 akan sangat

---

<sup>25</sup>Wogaman, *Christian* 35.

<sup>26</sup>Neil Elliot, "Romans 13:1-7 in The Context of Imperial Propaganda" dalam Richard A. Horsley, *Paul and Empire: Religion and Power in Roman Imperial Society* (Harrisburg: Trinity Press International, 1997) 184. Selain Elliot, sebagian besar teolog yang membahas bagian ini memiliki penilaian yang senada.

<sup>27</sup>Elliott, "Romans" 184.

bermanfaat dalam memberikan suatu arahan yang tepat dalam menentukan sikap politik mereka.

## PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan penjelasan di atas maka ada dua pertanyaan penting yang harus dijawab melalui studi eksegesis Roma 13:1-7. *Pertama*, “sikap politik seperti apakah yang dimaksud oleh Paulus dalam Roma 13:1-7?” *Kedua*, “bagaimanakah relevansi sikap politik tersebut bagi umat Kristen di Indonesia?”

## TUJUAN PENELITIAN

Melalui perumusan masalah di atas, maka tujuan akhir dari penulisan skripsi ini adalah menemukan penjelasan mengenai sikap politik yang Paulus kemukakan dalam Roma 13:1-7. Selanjutnya, menilai relevansi model sikap politik dalam Roma 13:1-7 tersebut terhadap konteks Indonesia pada era reformasi ini.

## BATASAN MASALAH

Penelitian mengenai sikap politik umat Kristen ini akan dibatasi oleh beberapa hal. *Pertama*, sikap politik yang dimaksudkan pada penulisan ini adalah sikap terhadap pemerintah. *Kedua*, penelitian ini ditujukan untuk menganalisis hubungan antara umat Kristen dengan pemerintah, dan tidak mempersoalkan mengenai bentuk negara. *Ketiga*, era reformasi yang dimaksud dalam penelitian ini, dimulai pada masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie hingga masa seratus hari kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

## METODE DAN SISTEMATIKA PENULISAN

Pada bab pertama, akan diuraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, serta metode dan sistematika penulisan.

Kemudian pada bab kedua, akan dipaparkan hasil tinjauan eksegesis terhadap Roma 13:1-7. Pada bagian ini hal-hal yang akan dipaparkan adalah sebuah introduksi terhadap Surat Roma, analisis konteks dekat-jauh, analisis struktur sintaksis, analisis kata, analisis teologis serta interpretasi terhadap Roma 13:1-7.

Pada bab ketiga, akan dipaparkan mengenai situasi dan kondisi di Indonesia pada era reformasi, dan konsep identitas umat Kristen di tengah-tengah situasi dan kondisi Indonesia pada era reformasi. Selanjutnya, berdasarkan data-data tersebut akan dilakukan suatu penilaian terhadap relevansi model sikap politik dalam Roma 13:1-7, terhadap sikap politik umat Kristen di Indonesia pada era reformasi.

Pada bab keempat, akan diberikan suatu kesimpulan dan saran-saran yang sifatnya biblis dan aplikatif mengenai sikap politik umat Kristen di Indonesia pada era reformasi.